



## Menjadi Gereja Kaum Miskin: Suatu Refleksi Teologi dan Dialog Antara Gereja dan Kaum Miskin dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia

Dismas Kwirinus<sup>1\*</sup>, Heribertus Peri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STFT Widya Sasana Malang

Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Kota Malang, Jawa Timur, 65146, Indonesia

<sup>2</sup> Saint Vincent School of Theology of Adamson University Manila

221 Tandang Sora Ave, Tandang Sora, Quezon City, Metro Manila, Philippines

\* Korespondensi: [dismaskwirinuspassio@gmail.com](mailto:dismaskwirinuspassio@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

### A B S T R A K

#### Histori Artikel

Diterima: 21-9-2023

Direvisi: 8-11-2023

Disetujui: 23-11-2023

#### Keywords:

Church; Fellowship;  
Justice; Poor;  
Sacrament of Salvation

#### Kata kunci:

Gereja; Keadilan;  
Miskin; Persahabatan;  
Sakramen  
Keselamatan

*The focus of this research examines the Church of the Poor. The topic of study is related to encounters and dialogue between churches and poor communities in the context of poverty in Indonesia. During a poverty situation like that which occurs in Indonesia, the church is invited to fulfil its calling. In situations like this, the church cannot simply be a donor or Santa organization. This means that to realize its call to the poor, the church must have the courage to become a "Church of the Poor". This research was conducted using qualitative descriptive methods and critical reading of texts, namely: (1) Documents of the Second Vatican Council; (2) FABC (Federation of Asian Catholic Bishops' Conferences) documents; (3) Books about the Church of the Poor; (4) Scientific articles about the Church of the Poor. The findings in this research are that what is meant by "church of the poor" here is a church that not only fights for the poor but more than that, a church that is willing to take sides and fight with them. The church must also dare to be open, willing to accept the poor as they are, and eliminate the dividing lines between themselves and the poor so that dialogue can occur between the two. The dialogue between the church and the poor here is a dialogue of life. Dialogue of life means dialogue that is based on accepting the poor as they are and making their problems and struggles to achieve true humanity the problems and struggles of the church as well.*

Fokus penelitian ini mengkaji Gereja Kaum Miskin. Topik kajiannya berkaitan dengan perjumpaan dan dialog antara Gereja dan masyarakat miskin dalam konteks kemiskinan di Indonesia. Di tengah situasi kemiskinan seperti yang terjadi di Indonesia, Gereja diajak untuk memenuhi panggilannya. Dalam situasi seperti ini, jelas bahwa Gereja tidak bisa hanya menjadi donor atau organisasi Sinterklas. Artinya untuk mewujudkan panggilannya kepada masyarakat miskin, Gereja harus berani menjadi "Gereja Orang Miskin". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pembacaan kritis terhadap teks, yaitu: (1) Dokumen Konsili Vatikan II; (2) dokumen FABC (Federasi Konferensi Waligereja Asia); (3) Buku tentang Gereja Kaum Miskin; (4) Artikel ilmiah tentang Gereja Kaum Miskin. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa yang dimaksud dengan "Gereja Kaum Miskin" di sini adalah Gereja yang tidak hanya memperjuangkan kaum miskin namun lebih dari itu, Gereja yang mau memihak dan berjuang bersama mereka. Gereja juga harus berani bersikap terbuka, mau menerima masyarakat miskin apa adanya, dan menghilangkan garis pemisah antara dirinya dengan masyarakat miskin sehingga dapat terjadi dialog antar keduanya. Dialog antara Gereja dan masyarakat miskin di sini adalah dialog kehidupan. Dialog kehidupan berarti dialog yang didasarkan pada penerimaan terhadap kaum miskin apa adanya dan menjadikan permasalahan serta perjuangan mereka untuk mencapai kemanusiaan yang sejati sebagai permasalahan dan perjuangan Gereja juga.

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan itu menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia justru karena di tengah-tengah berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai oleh bangsa ini ternyata masih dijumpai sekian banyak rakyat yang hidup menderita karena kemiskinan, sementara sebagian kecil saja yang dapat hidup dengan enak bahkan penuh dengan kelimpahan (Jebadu, 2017; Yunus, 2007). Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Masatsugu Asakawa, presiden Bank Pembangunan Asia (ADB: Asian Development Bank). Masatsugu mengatakan, kendati negara-negara Asia termasuk Indonesia kini praktis merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dunia, namun ironisnya wilayah ini masih dihuni lebih dari tujuh ratus juta penduduk miskin. Ini berarti sekitar 60% dari penduduk miskin dunia ada di Asia (Anggraeni, 2018). Lebih tragis lagi, dari 60% penduduk miskin itu, 30% masih berada pada tingkat kemiskinan absolut (Anggraeni, 2018). Kemiskinan itu adalah fakta dan masalah sosial yang tidak dapat diingkari atau di tutup-tutupi. Namun, mengejutkan bahwa para pemimpin bangsa dewasa ini banyak yang merasa enggan bila diajak berbicara mengenai soal kemiskinan. Mereka tidak setuju kalau masalah kemiskinan itu terlalu dibesar-besarkan atau ditonjolkan ke depan. Contoh nyata tentang hal ini tampak dalam komentar mereka terhadap bencana kemarau baru-baru ini yang mengakibatkan sebagian penduduk terpaksa harus makan “tiwul”. Menurut mereka, makan “tiwul” itu bukan disebabkan karena kekurangan pangan tetapi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan penduduk (Jebadu, 2017). Mengapa mereka tidak mau diajak bicara tentang masalah kemiskinan? Ada banyak alasan yang bisa dikemukakan. Namun di sini cukuplah kalau dikemukakan dua alasan saja.

Optimisme akan hasil pembangunan menurut Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, dalam wawancaranya dengan wartawan Kompas TV mengatakan bahwa perhatian terhadap persoalan kaum miskin dewasa ini akan memberi kesan seperti suatu anti klimaks sebab keadaan ekonomi secara makro membaik. Dalam keadaan demikian, membicarakan kemiskinan seakan-akan menunjukkan peremehan terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah (Jafar, 2022). Alasan selanjutnya adanya perasaan malu untuk mengakui kelemahannya sendiri. Banyak orang enggan untuk mengakui bahwa dirinya miskin. Dengan berbagai cara, mereka selalu berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya. Hal yang sama juga masih terjadi dalam level internasional. Banyak negara yang sebenarnya masih tergolong sebagai negara “dunia ketiga”, namun dalam pergaulan internasional enggan kalau disebut sebagai negara yang sedang berkembang. Mereka lebih suka dianggap sebagai negara yang kaya dan makmur.

Di tengah kejenuhan dan keengganan berbagai pihak, khususnya pihak yang berkuasa untuk membicarakan masalah kemiskinan, Gereja Indonesia nyatanya sampai saat ini tetap teguh pada pendiriannya untuk menjadikan kaum miskin sebagai prioritas perhatiannya. Sejak semula Gereja memang selalu merasa terdorong untuk secara khusus memberi perhatian kepada para janda, yatim piatu, anak gelandangan dan orang asing. Alasan mendasar yang mendorong Gereja untuk berbuat demikian adalah Kristus sendiri. Gereja yakin bahwa di dalam diri orang-orang yang miskin dan menderita itu, terpantul wajah Kristus sendiri (Dhana, Mikha, & Paulina, 2021). Bukankah Kristus pernah mengidentifikasikan diri-Nya dengan mereka yang lemah dan dianggap tak berguna? (bdk. Mat 25:40). Atas dasar keyakinan ini, maka sejak sekitar abad pertengahan, di dalam Gereja muncul berbagai karya karitatif yang tujuannya untuk membantu meringankan penderitaan mereka yang miskin. Kebiasaan semacam ini rupanya berkembang terus sampai di Indonesia hingga saat ini.

Menarik bahwa dibalik gencarnya tindakan karya karitatif Gereja Indonesia selama ini, peneliti, ketika menjalani tahun pastoral di Kalimantan Barat, masih menjumpai juga peristiwa “menyedihkan” yang kiranya patut menjadi bahan refleksi bagi seluruh anggota Gereja.

Peneliti yakin bahwa peristiwa “menyedihkan” semacam ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi di tempat lain juga. Adapun peristiwa “menyedihkan” tersebut adalah banyaknya kaum miskin yang meskipun mereka telah bekerja keras setiap hari dan juga telah berulang kali menerima “derma” dari Gereja, namun ternyata belum juga bisa terbebas dari belenggu kemiskinannya. Mengalami kenyataan yang demikian ini, banyak kaum miskin yang kemudian sungguh menggantungkan hidupnya dari bantuan Gereja. Akibatnya, bila Gereja menutup pundi-pundi kekayaannya, banyak diantara mereka yang menjadi frustrasi, tidak tahu harus berbuat apa dan pada akhirnya lari meninggalkan Gereja. Peristiwa ini bagi Gereja, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, jelas merupakan suatu “musibah”.

Berdasarkan pengalaman akan “musibah” yang dialami oleh Gereja seperti tersebut di atas, dalam benak peneliti muncul suatu kenyataan bahwa kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar penduduk Indonesia itu sebenarnya bukan terjadi secara kebetulan. Seandainya kemiskinan di Indonesia itu terjadi secara kebetulan, mengapa banyak kaum miskin yang sebenarnya telah bekerja keras siang-malam dan juga telah menerima berbagai bantuan dari Gereja, tetapi belum mampu juga keluar dari belenggu kemiskinan? Kalau kemiskinan di Indonesia itu tidak terjadi secara kebetulan, lalu apa yang menyebabkannya? Berhadapan dengan kemiskinan semacam ini, maka dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan salah satu tema yang sebenarnya sejak berakhirnya Konsili Vatikan II (1965) telah berkembang pesat di dunia ketiga. Adapun tema tersebut adalah “Gereja Kaum Miskin”. Persoalan pokok yang terkandung di dalam tema ini adalah apa arti Gereja dan hidup menggereja di tengah kemiskinan dunia ketiga dan secara khusus di Indonesia yang terjadi memang secara tidak kebetulan itu? Apa yang harus dilakukan Gereja di tengah kemiskinan semacam ini? Cukupkah bila Gereja hanya melayani kaum miskin dengan karya karitatif, seperti yang telah ia jalankan selama ini?

Sasaran dari penelitian ini adalah mengingat sampai sekarang ini Gereja cenderung hanya bersifat sebagai suatu “lembaga” dan sumber ajaran sosial, maka melalui tulisan ini peneliti mengajak semua anggota Gereja untuk menjadikan apa yang ditawarkan dan diajarkan itu sebagai *way of life* sendiri. Artinya jika Gereja ingin dengan sungguh-sungguh mewujudkan komitmennya terhadap kaum miskin, seperti yang tampak dalam ajaran sosialnya, langkah pertama yang harus di tempuh Gereja adalah mau solider, hidup dan berjuang bersama dengan kaum miskin.

Selanjutnya menyegarkan kembali kesadaran seluruh anggota Gereja bahwa keterlibatannya di dalam perjuangan membangun dunia dan menegakkan keadilan itu merupakan bagian dari usaha membangun Kerajaan Allah. Tentang hal ini memang telah dinyatakan dengan jelas sekali oleh Konsili Vatikan II, khususnya di dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam dunia. Berkaitan dengan usaha Gereja membangun dunia, Konsili mengatakan: “Sungguhpun kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan kerajaan Kristus, tetapi kemajuan ini sangat penting bagi Kerajaan Allah, sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik” (GS, art. 39). Sedangkan berkaitan dengan usaha menegakkan keadilan dikatakan: “Barang siapa patuh taat kepada Kristus dan pertama-tama mencari Kerajaan Allah, akan menimba dari padanya cinta kasih yang lebih kuat dan lebih jernih guna membantu semua saudaranya, dan terdorong oleh semangat cinta kasih melaksanakan karya keadilan” (GS, art. 72).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dan pembacaan kritis atas teks. Peneliti berusaha mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena

akan menganalisis kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian pustaka dan pembacaan kritis atas teks dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku, jurnal dan dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan pilihan tema yang menjadi konsentrasi penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fenomena Kemiskinan di Indonesia**

Sebagai manusia, kita memang mempunyai kecenderungan untuk selalu berusaha keluar dari keadaan yang tidak mengenakkan. Sejalan dengan hal ini, maka tidaklah mengherankan kalau banyak orang berusaha mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya. Adapun motif yang mendorong orang untuk mengangkat dan mengungkapkan masalahnya pada umumnya adalah adanya kesadaran bahwa mengubah atau mengatasi suatu masalah hanya mungkin kalau masalahnya diketahui secara jelas (Anggraeni, 2018). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pada umumnya orang memakai istilah “miskin” itu tanpa terlalu banyak berpikir. Bagi mereka, istilah “miskin” itu dirasa sudah jelas maksudnya, yaitu jika kebutuhan pokok tak terpenuhi, pendapatan yang amat rendah atau hidup serba kekurangan. Begitu pula orang yang digolongkan sebagai orang miskin pun sudah jelas juga, yaitu: gelandangan, pengemis, pedagang asongan, buruh harian, dan lain sebagainya.

Pada intinya, kemiskinan itu mempunyai banyak segi dan dimensi, mulai dari yang bersifat material sampai dengan yang bersifat mental (Husna, 2014). Jika demikian halnya, maka dalam merumuskan dan menentukan tolok ukur yang tepat mengenai kemiskinan ini tidak boleh berat sebelah, hanya dari sudut materi (segi kuantitatif) atau mental belaka (segi kualitatif) (Husna, 2014). Dalam konteks ini, kemiskinan memang tidak boleh hanya diartikan sebagai kondisi hidup yang kekurangan pangan, papan, atau sandang saja. Kemiskinan juga harus dilihat dalam kaitannya dengan rendahnya akses seseorang terhadap berbagai sumber daya dan produksi yang sangat diperlukan untuk memperoleh sarana kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti: pendidikan, informasi, teknologi, dan lain-lain (Husna, 2014). Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa untuk merumuskan arti kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah dan tidak gampang juga mengatakan siapakah orang miskin itu sebenarnya. Oleh sebab itu perlu memperhatikan dimensi yang bersifat material maupun mental untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kemiskinan dan siapa orang miskin.

### ***Kemiskinan Material***

Mendengar kata miskin orang pasti langsung berpikir tentang suatu kondisi yang menyedihkan yang disebabkan karena kekurangan materi atau harta benda (Fatimah, 2015). Pengertian kemiskinan yang diukur berdasarkan terpenuhi tidaknya kebutuhan material seperti ini, memang tidak salah. Namun demikian, perlu juga diakui bahwa dalam pengertian ini masih terkandung suatu problem mendasar yang sulit untuk dipecahkan. Adapun problem yang dimaksud di sini adalah mengenai tolok ukur yang harus dipakai untuk mengatakan bahwa seseorang itu miskin. Jikalau orang miskin itu dikatakan sebagai orang yang tidak berharta benda, lalu apakah ukuran yang dipakai untuk mengatakan bahwa orang tersebut tidak berharta benda sehingga layak disebut miskin?

Ada yang memakai pendapat minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari sebagai tolok ukur atau kriterianya. Tolok ukur semacam ini, di Indonesia dikenal dengan istilah “Kebutuhan Fisik Minimum” (KFM) atau “Kebutuhan Hidup Minimum” (KHM). Tidak ada kata sepakat tentang jumlah Kebutuhan Fisik Minimum yang

diperlukan penduduk Indonesia (Fatimah, 2015). Ada yang menetapkan sekitar Rp 50.000 per bulan per orang. Tapi ada pula yang menetapkan lebih rendah lagi dari pada itu, yaitu jika diwujudkan dalam bentuk materi sebesar 320 kg beras per tahun per orang (Fatimah, 2015). Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia sendiri menetapkan 2100 kilo kalori per orang per hari atau kalau dijumlahkan dalam bentuk uang sebesar Rp 17.381 (kota) dan Rp 10.294 (desa) per bulan (Biro Pusat Statistik, 2022). Sedangkan menurut Bank Dunia, batas minimum penghasilan seseorang untuk dapat dikatakan miskin adalah 370 dolar Amerika per orang per tahun (Fatimah, 2015).

Untuk mengecek ketepatan tolok ukur yang telah ditetapkan di atas, peneliti membandingkan dengan realitas kehidupan yang ada. Sebagai salah satu contoh golongan kaum miskin yang ada di Indonesia, yaitu tukang becak. Hasil penelitian Suwandi dan Faud dari Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) diperoleh data bahwa penghasilan tukang becak sehari rata-rata Rp 2.000-4.000 ribu per hari dengan jam kerja sekitar 6-15 jam (Suwandi dan Faud, 2022). Setiap bulannya mendapat penghasilan sekitar Rp 60.000-120.000. Jika ukuran kemiskinan itu ditetapkan sekitar Rp 50.000 per bulan, lalu apakah tukang becak di Surakarta ini tidak dapat digolongkan sebagai orang miskin?

### ***Kemiskinan sebagai Penolakan Hak Sosial***

Kemiskinan merupakan fenomena yang multidimensional, maka bisa didekati dari banyak sudut. Selain dari sudut materi, kemiskinan itu bisa juga didekati dari sudut lainnya. Ada berbagai pendekatan yang bisa digunakan untuk mengamati kemiskinan. Diantara pendekatan-pendekatan itu antara lain: pertumbuhan, kebutuhan dasar, dan juga pemberdayaan masyarakat (Koentjorojakti, 2000; Fatimah, 2015).

Pendekatan kaum miskin yang umum dipakai dan mejadi "trend" untuk dewasa ini adalah pendekatan yang disebut dengan istilah "*Social Exclusion*". *Social Exclusion* adalah suatu sistem pendekatan kemiskinan yang melihat kemiskinan bukan semata-mata sebagai soal perhitungan jumlah materi yang dapat dikonsumsi atau dipakai, tetapi sebagai penolakan hak-hak sosial terhadap standar hidup dan partisipasi dalam institusi-institusi primer baik di bidang sosial, politik, dan juga kegiatan produksi (Koentjorojakti, 2000; Fatimah, 2015). Pendekatan ini di dasarkan pada kenyataan bahwa golongan rakyat kecil, seperti: tukang becak, buruh pabrik, para petani, nelayan dan semua orang yang tidak mempunyai modal dan kuasa, cenderung mengalami kemiskinan permanen. Mengapa sampai terjadi demikian? Hal ini disebabkan terutama karena mereka tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan institusi-institusi primer yang ada dalam masyarakat.

### **Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Indonesia**

#### ***Kemiskinan Sebagai Akibat Kesalahan Kaum Miskin Sendiri***

Menurut mereka yang menganut ideologi konservatif, kemiskinan itu muncul karena kesalahan kaum miskin sendiri. Ideologi konservatif adalah ideologi yang mendasarkan diri pada kapitalisme dan liberalisme abad 19 (Kenneth R., 2013). Ideologi ini sangat menjunjung tinggi kebebasan, khususnya dalam bidang ekonomi (pasar bebas) yang merupakan dasar adanya struktur sosial dalam masyarakat. Dalam strategi pasar bebas, setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dalam bersaing sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Dari sini akan muncul individu-individu yang berhasil, tetapi ada juga yang gagal.

Individu-individu yang gagal dalam persaingan itulah yang disebut kaum miskin. Mereka gagal dalam bersaing karena mentalitasnya yang kurang baik, bodoh dan tidak punya keterampilan. Karena alasan ini, maka kaum konservatif tidak melihat kemiskinan sebagai suatu masalah serius yang perlu dikhawatirkan. Kemiskinan itu akan teratasi dengan sendirinya bila kaum miskin mau mengubah mentalitasnya.

Karena kemiskinan itu berkaitan dengan masalah mentalitas, maka tidak bisa dipecahkan hanya dengan memberi bantuan sosial. Bantuan sosial ini memang penting dan sangat diperlukan, tetapi bila tidak dilakukan dengan hati-hati, ada bahaya justru akan membuat kaum miskin *terninabobokan* dalam kemalasannya (Pareira, B.A., 1996). Langkah yang paling tepat membantu kaum miskin melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya adalah dengan memberi motivasi kepada mereka. Berdasarkan hal ini, maka kaum konservatif suka menyebarkan cerita-cerita perjuangan seseorang yang sukses menaikan taraf hidupnya, misalnya dari seorang tukang penjual beras eceran menjadi konglomerat terkemuka. Cerita keberhasilan semacam ini disebarluaskan kepada masyarakat melalui media masa dengan maksud agar masyarakat luas ikut termotivasi untuk berbuat yang sama.

### ***Kemiskinan Sebagai Akibat Struktur Kehidupan Masyarakat yang Tidak Adil***

Ketika kita mengamati perbedaan hasil pekerjaan antar golongan-golongan di dalam masyarakat Indonesia, pendapat kaum konservatif tersebut di atas memang perlu dipertanyakan lebih lanjut. Misalnya, bagi mereka yang terhitung golongan atas atau menengah, untuk memperoleh uang enam juta dalam satu bulan, asal mau bekerja keras dan kreatif, tidaklah terlalu sulit. Akan tetapi, bagi seorang buruh tani atau harian, hasil maksimal yang bisa mereka capai paling besar Rp 60.000. Jadi perbedaannya mencapai kira-kira 1 berbanding 100. Mengapa sampai demikian? Jawaban umum yang diberikan atas persoalan ini adalah ketidakadilan dalam struktur kehidupan masyarakat. Jadi kemiskinan itu sebenarnya bukan karena kehendak atau kemalasan orang miskin, tetapi karena sekelompok kecil orang yang berkuasa mengatur kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga kemiskinan hampir menjadi “nasib atau takdir” golongan masyarakat bawah (Muhammad, 2007). Kenyataan ini oleh A. Muis disebut sebagai usaha “pemiskinan” (Muis, 2022).

Mengalami keadaan yang tidak adil ini, rakyat kecil sering kali menjadi mudah marah dan bahkan berbuat kasar bila ada pihak yang menyinggung perasaan mereka (Yunus, 2022). Misalnya di Tanah Abang, Jakarta seorang karyawan paruh waktu tega membunuh majikannya dengan cara memutilasi dan mengecor bagian tubuh korban dengan semen lantaran karena karyawan itu sakit hati (Yunus, 2022). Contoh lain masih di Jakarta, massa mengamuk, merusak serta membakar mobil trantib dan kantor kecamatan. Kerusakan ini didasarkan karena ada isu bahwa seorang pedagang kaki lima tewas ditabrak mobil petugas trantib (Ivonne, 2022). Kerusakan massa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat yang disebabkan tertabraknya seorang tukang becak hingga tewas (Ivonne, 2022).

### ***Pola Pembangunan yang Bersifat Konsentris***

Kalau melihat proses pembangunan di Indonesia yang berlangsung sekian lama tetapi belum juga bisa mengikis kemiskinan yang ada, maka kita memang layak bertanya: kemanakan hasil pembangunan yang telah diperoleh selama ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kalau kita menengok kembali pola atau strategi pembangunan yang digunakan oleh bangsa Indonesia selama ini. Menurut Taufik Alimi, pola pembangunan yang dipakai Indonesia selama ini cenderung bersifat konsentris dengan titik tumbuh pada sektor industri. Pola pembangunan konsentris artinya pola pembangunan yang menempatkan salah satu sektor pembangunan sebagai prioritas titik tumbuh yang kemudian diharapkan terjadi perluasan yang melingkar-lingkar sampai luas (Taufik, 2022).

Pola konsentris di Indonesia ini selanjutnya dilaksanakan juga secara geografis dengan Jawa dan khususnya Jakarta sebagai titik tumbuh, juga secara kelas sosial dengan pengusaha kelas kakap dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai titik tumbuh. Sedangkan kelas-kelas lain hanya menerima luapannya. Pola pembangunan semacam ini jelas memberatkan rakyat banyak karena ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan; Pertama, terjadinya luapan atau tetesan pertumbuhan tergantung dari sekap

mereka yang menjadi titik tumbuh bersikap rakus, maka mereka yang di bawah tidak akan kebagian. Padahal kita tahu bahwa hampir semua mereka yang duduk di pusat pertumbuhan adalah orang-orang yang jauh dari sikap sederhana. Hal ini tampak misalnya dari semakin merajalelanya korupsi dan kolusi (Muis, 2022). Lebih tragis lagi, korupsi sering kali dianggap sebagai hal yang sudah biasa.

Kedua, dengan semakin meningkatnya efektifitas kegiatan ekonomi (industri), maka harga-harga komoditas semakin naik. Akibatnya, sebagian besar rakyat yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi (industri) pun terkena dampaknya, mereka harus ikut menanggung biaya tambahan akibat naiknya harga komoditas. Keuntungan yang diperoleh masyarakat di sekitar kawasan industri masih lebih rendah dari lonjakan biaya hidup sehari-hari yang harus mereka pikul.

Ketiga, pola pembangunan yang berpola konsentris dengan penekanan pada sektor industri jelas membawa akibat penganaktirian sektor yang lain. Hal ini tentu saja mengakibatkan nasib para petani kurang terangkat. Harga produk produksi selalu naik, sementara harga produk pertanian sangat lamban. Lebih parah dari hal ini, para petani sering kali harus menjadi “kurban” bagi mereka yang punya kuasa dan modal. Pembebasan tanah untuk *real estate* atau industri atau padang *golf* yang bernilai miliaran adalah contoh pengorbanan rakyat kecil tanpa imbalan yang sepadan.

### ***Penekanan Pembangunan pada Segi Pertumbuhan Ekonomi***

Selain pembangunan yang bersifat konsentris, arah dasar pembangunan yang cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi juga ikut menjadi sebab terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Prinsip utama teori pertumbuhan ekonomi ini berbunyi: “pemerataan hasil pembangunan itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga apa yang didistribusikan akan jauh lebih besar” (Muis, 2022). Untuk menjamin agar pertumbuhan ekonomi negara tetap berjalan dengan lancar dan stabil, maka apapun yang tidak mendukungnya harus dikurbankan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Mengapa demikian? Karena kalau pembangunan itu hanya menekankan pertumbuhan, maka kalau terjadi konflik antara lain pertumbuhan dan pemerataan demi keadilan, pemerintahlah yang sering kali dikalahkan. Sementara itu, nasib golongan miskin tidak mungkin bisa diperbaiki kalau hanya mengharapkan efek “tetesan ke bawah” dari proses pembangunan yang bersifat “*top-down*” dan “*growth-oriented*” (Taufik, 2022). Sebagian besar masyarakat di daerah tidak sempat menikmati hasil pembangunan. Hasil pembangunan itu lebih banyak dinikmati oleh golongan atas dan sedikit merembes ke bawah.

## **Panggilan Gereja Berhadapan dengan Persoalan Kemiskinan**

### ***Kesatuan Gereja dan Dunia***

Ditinjau dari sudut manusia, Gereja yang adalah persekutuan manusia-manusia yang percaya kepada Kristus dan “dunia” itu memang tidak terpisahkan. Keduanya adalah satu, yaitu manusia menurut aspek realisasinya dengan Allah. Manusia disebut “Gereja” sejauh hubungannya dengan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus terungkap dalam bentuk agama (Kristen). Sedangkan manusia disebut “dunia” sejauh sebagai subjek otonom berhadapan dengan Allah. Kalau Gereja dan dunia itu satu, tentu saja sejauh “dunia” di sini diartikan sebagai dunia manusia, maka tepatlah kalau dalam artikel ini konstruksi pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini dikatakan: “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga” (Konsili Vatikan II, LG, art. 1). Hal senada meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, juga

terdapat di dalam Pedoman Gereja Katolik Indonesia: “Umat Katolik merasakan segala kegembiraan dan harapan yang serupa dengan kegembiraan dan harapan seluruh rakyat nusantara. Umat Katolik ikut bergembira atas keberhasilan pembangunan dan ikut bertanggung jawab pula atas kekurangannya” (KWI, 1996).

Dari kedua ungkapan dokumen Gereja ini tampak jelas bahwa Gereja yang merupakan kumpulan manusia-manusia yang percaya kepada Kristus, diajak untuk solidier dengan sesamanya, khususnya sesama yang miskin dan menderita. Dasar solidaritas Gereja ini pertama-tama bukan karena orang miskin dan menderita itu perlu dikasihani (sebagai objek), tetapi karena mereka adalah manusia (sebagai subjek) sama dengan Gereja yang adalah kumpulan manusia yang percaya kepada Kristus. Berdasarkan gagasan ini, maka solidaritas Gereja itu tidak boleh bersifat eksklusif. Maksudnya adalah Gereja tidak boleh hanya memperhatikan penderitaan mereka yang percaya kepada Kristus saja. Solidaritas Gereja itu harus berlaku universal bagi semua manusia tanpa memandang suku, agama, etnis ataupun warna kulitnya.

### **Gereja Sebagai Sakramen Keselamatan**

Arti dasar Gereja memang adalah persekutuan manusia yang percaya kepada Kristus. Namun persekutuan ini bukanlah persekutuan biasa. Mengapa? Karena dasar persekutuan ini adalah kehendak Allah sendiri. Sejak semula, yaitu sejak Ia untuk pertama kalinya merencanakan menciptakan manusia, Allah memang telah menghendaki agar manusia hidup bahagia dalam persekutuan dengan-Nya (Dien, 2020). Kehidupan manusia yang penuh kebahagiaan dan kedamaian dalam kesatuan mesra dengan Allah ini disebut keselamatan. Untuk melaksanakan rencana keselamatan-Nya ini, maka Allah mengutus Kristus yang adalah citra-Nya sendiri datang ke dunia untuk memanggil semua orang masuk ke dalam persekutuan ilahi-Nya dan mengumpulkan mereka yang percaya kepada Kristus dalam Gereja. Karena alasan ini, maka Gereja sejauh masih ada di dunia ini, dipandang sebagai sakramen keselamatan, yaitu persekutuan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya.

Berdasarkan gagasan bahwa Gereja adalah sakramen keselamatan ini, Konsili Vatikan II mengatakan: “Setiap jasa sumbangan, yaitu oleh umat Allah selama ziarahnya di dunia dapat diberikan kepada keluarga manusia bersumber pada kenyataan bahwa Gereja itu adalah sakramen keselamatan bagi semua orang, sertamerta menampilkan dan mengamalkan misteri cinta kasih Allah kepada manusia” (Dien, 2020). Berdasarkan apa yang diungkapkan Konsili ini tampak bahwa dasar panggilan Gereja untuk memperhatikan manusia dan tentu saja secara khusus manusia yang miskin dan menderita adalah kenyataan bahwa Gereja merupakan sakramen keselamatan bagi semua orang. Muncul persoalan apa hubungan Gereja sebagai sakramen keselamatan dengan panggilannya untuk memperhatikan persoalan kaum miskin?

Perlu dicatat bahwa Gereja itu menjadi lambang dan upaya keselamatan hanya di dalam Kristus (Dien, 2020). Karena itu, bila kita ingin mengetahui apa hubungan fungsi Gereja sebagai sakramen keselamatan dengan panggilannya untuk memperhatikan kaum miskin, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah melihat kembali apa yang dikerjakan oleh Kristus sebagai pelaksana rencana Allah di dunia. Misi utama kedekatan Kristus ke dunia adalah untuk menegaskan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Allah dikatakan telah meraja di bumi bila kehendak-Nya telah terlaksana (Dien, 2020). Isi utama kehendak Allah adalah agar manusia hidup damai, sejahtera dan bahagia dalam kesatuan dengan diri-Nya. Berdasarkan misi-Nya ini, maka tidaklah mengherankan jika perhatian Kristus, baik dalam pewartaan maupun pelayanan-Nya, tertuju terutama kepada mereka yang miskin dan tertindas (bdk. Luk 4:18:19). Mereka mendapat perhatian Kristus secara khusus alasannya karena Kerajaan Allah (keselamatan) itu tidak dapat dirasakan kehadirannya di

dunia ini bila di satu pihak masih ada yang menindas dan tertindas, atau juga kalau masih ada yang berkelimpahan dan yang kelaparan. Untuk itu, sambilewartakan Kerajaan Allah, Yesus juga mengadakan berbagai mukjizat untuk menyembuhkan orang buta, orang kusta, orang tuli, dan membangkitkan orang mati (bdk. Mat 11:2-6). Semuanya ini dilakukan Yesus untuk menunjukkan bahwa Kerajaan Allah itu sungguh telah hadir, khususnya bagi mereka yang miskin dan tertindas. Berdasarkan hal ini, maka tepatlah kalau warta tentang Kerajaan Allah itu disebut sebagai warta yang menggembirakan bagi mereka yang miskin dan tertindas, sehingga mereka layak dipuji sebagai orang yang berbahagia (bdk. Mat 5:3).

Jadi, jika Gereja ingin mewujudkan fungsinya sebagai sakramen keselamatan, ia bagaimanapun tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kaum miskin. Kalau Kristus yang adalah pelaksana rencana keselamatan Allah dan sekaligus sumber pelayanan-Nya mencurahkan perhatian-Nya terutama pada yang miskin dan tertindas, demikianlah juga seharusnya Gereja.

## **Menjadi Gereja Kaum Miskin: Panggilan dan Arti Gereja Kaum Miskin**

### ***Panggilan Menjadi Gereja Kaum Miskin***

Permasalahan pokok kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu pertama-tama bukan soal tidak adanya kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang, tetapi lebih dari itu, menyangkut soal struktur kehidupan masyarakat yang tidak adil yang menyebabkan banyak anggota masyarakat tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020). Berhadapan dengan persoalan kemiskinan, kehadiran Gereja yang memang telah dipanggil untuk memperhatikan kaum miskin, jelas tidak bisa hanya seperti seorang “penasihat” atau “penderma” yang menyuruh kaum miskin bekerja rajin atau dengan memberi sumbangan ala *sinterklas*. Dalam situasi demikian, kehadiran Gereja juga tidak bisa hanya seperti seorang pemeran utama dalam sebuah permainan “*teater*” yang fungsinya hanya sebagai penghibur. Sebagai pemeran utama, Gereja justru dituntut harus mampu menimbulkan kenikmatan dalam usaha mencari pengertian dan kesenangan dalam usaha mengubah dunia (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020). Oleh karena itu, bila Gereja ingin mewujudkan komitmennya terhadap kaum miskin, khususnya yang ada di Indonesia, ia harus berani mengubah koordinat-koordinat struktur masyarakat yang menjadi batas kemampuan bagi mereka yang kecil dan tak berdaya. Hal mengubah struktur masyarakat itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kiranya diakui oleh semua orang. Akan tetapi, mengakui faktor kesulitan dan lamanya waktu yang dibutuhkan, tidak berarti bahwa Gereja harus menunggu keajaiban (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020).

Jika demikian halnya, jelas bahwa panggilan Gereja untuk memperhatikan terutama kaum miskin itu, tidak mungkin hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan cinta kasih (karya karitatif), tetapi harus sungguh-sungguh merupakan perwujudan cinta kasih Kristus yang membebaskan (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020). Untuk mencapai maksud ini, Gereja mau tidak mau harus “Menjadi Gereja Kaum Miskin”.

### ***Arti Gereja Kaum Miskin***

Harus diakui bahwa tidak ada definisi yang baku tentang istilah “Gereja Kaum Miskin”. Namun dari beberapa ungkapan yang terdapat di dalam dokumen Gereja, seperti misalnya Lumen Gentium artikel 8, Ad Gentes artikel 6, Centesimus Annus artikel 57-58, penulis dapat menarik beberapa gagasan penting yang terkandung di dalam ungkapan “Gereja Kaum Miskin” ini.

*a. Pilihan yang Mendahului Kaum Miskin*

Pada dasarnya “Gereja Kaum Miskin” itu merupakan suatu cita-cita antara harapan dari kehadiran Gereja di tengah-tengah kaum miskin. Karena merupakan suatu cita-cita yang sedang diusahakan, maka di depan frase “Gereja Kaum Miskin” diletakkan kata “Menjadi” untuk menunjukkan suatu proses.

Tekanan utama yang terkandung di dalam harapan ini bukan saja agar Gereja itu solider dengan kaum miskin seperti halnya Kristus yang telah rela menjadi miskin sekalipun ia kaya (2 Kor 8:9) sebagai kesaksian, tetapi lebih dalam dari itu supaya perhatian Gereja, seperti halnya Tuhannya, baik dalam pewartaan maupun pelayanannya, tertuju terutama kepada kaum miskin (*preferential option for the poor*) (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020). Adapun tujuan perhatian ini adalah agar mereka yang miskin dapat merasakan kehadiran Gereja yang katanya bertugas membawa “Warta Gembira” ke dunia (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020).

*b. Pilihan yang Tidak Eksklusif*

Meskipun perhatian Gereja itu tertuju terutama kepada kaum miskin, namun tetap tidak bersifat eksklusif dengan menolak kelompok-kelompok lain atau menjalankan diskriminasi terhadapnya (Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020). Menurut Karl Rahner, di samping harus bermakna bagi kaum miskin, kehadiran Gereja juga dihadapkan dapat membawa orang kaya berhadapan dengan kesengsaraan Yesus Kristus dan kemudian mau memerangi struktur penindasan yang ada (Rahner, 1986; Arisiwarjaya, 1987; Dien, 2020).

Di samping itu, meskipun pewartaan maupun pelayanan Yesus itu terutama tertuju kepada kaum miskin, namun bukankah Ia juga tetap memperhatikan mereka yang bijaksana, kaya dan berkuasa? Pilihan mendahulukan kaum miskin adalah sikap dan tindakan mengikuti Yesus yang memaklumkan Kerajaan Allah. Dengan memaklumkan Kerajaan Allah, Yesus mengundang siapa saja tanpa kecuali untuk membentuk suatu persaudaraan, di mana jurang antara yang kaya dan miskin dijembatani, di mana tidak ada lagi pemeras dan yang diperas, penindas dan yang ditindas, di mana semua orang dapat “makan bersama” (Pareira, B.A., 1996).

*c. Pilihan yang Bersifat Eksistensial*

Perhatian Gereja terhadap kaum miskin ini pada prinsipnya bersifat eksistensial, yang timbul dari kesadaran Gereja sendiri bahwa dirinya juga miskin. Berdasarkan kesadaran ini, Gereja memang tidak lagi beranggapan bahwa dirinya dengan kemampuannya sendiri sanggup memenuhi kebutuhannya, memiliki jawaban atas segala sesuatu dan mencoba menundukkan setiap orang (sebagai objek) di bawah pengaruhnya. Gereja kini sadar bahwa ia juga bersifat sosial. Gereja tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Karena bersifat sosial, maka Gereja pun wajib bersikap terbuka: sanggup menerima bantuan orang lain atau sebaliknya, harus selalu siap sedia untuk membantu orang lain (Rubianto, 1997). Berdasarkan hal ini, maka tekanan utama yang mau ditonjolkan dalam *preferential option for the poor* itu terutama adalah kaum miskin harus menjadi “subjek” perhatian seluruh Gereja (Rubianto, 1997).

*d. Spiritualitas “Gereja Kaum Miskin”*

Spiritualitas merupakan kehendak bebas Gereja untuk memikirkan dan menghayati hidup imannya dalam kehidupan, baik dalam bentuk ritus maupun tindakan konkret (Loreta, N. Castro & Arij A. Roest, 1995). Berkaitan dengan Gereja Kaum Miskin, maka dapat diartikan sebagai wujud kehendak Gereja untuk memikirkan dan menghayati hidup imannya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang kurang beruntung dan tertindas dan yang pada intinya Gereja ingin bersama-sama dengan berbagai pihak mengusahakan terjadinya perubahan-perubahan hidup dan tata susunan sosial yang lebih adil dan dilandasi cinta kasih dengan preferensi kepada orang miskin dan kecil tersebut (Loreta, N. Castro & Arij A. Roest, 1995).

Adapun inti hidup rohani orang kristen (Gereja) adalah bahwa Allah mencintai mereka. Karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa dan menjauhkan diri dari pada-Nya, Allah dengan berbagai cara, baik melalui para nabi dan akhirnya Putera-Nya sendiri, berusaha memulihkan hubungan yang telah retak ini. Tujuannya adalah agar manusia selamat.

### **Perwujudan Gereja Kaum Miskin**

Mengingat bahwa sebagian besar kemiskinan itu bukan menyangkut kurangnya nilai-nilai, sifat-sifat atau bakat kemampuan manusiawi; melainkan karena tiadanya kemungkinan untuk mendapat perbekalan dan sumber-sumber material yang dibutuhkan untuk menciptakan hidup yang sungguh manusiawi. Hal ini diarahkan pada pilihan Gereja yang mengutamakan kaum miskin itu tidak bisa diwujudkan oleh Gereja hanya dengan bekerja bagi kaum miskin (Suryadi, 2016). Sebagai contoh seperti lembaga penderma, melainkan harus tampak di dalam solidaritas, praktik hidup dan keterlibatan Gereja sendiri dalam perjuangan bersama kaum miskin untuk menegakkan keadilan.

### **Solidaritas dengan Kaum Miskin**

Hal yang dimaksud dengan solidaritas di sini, jelas bukan solidaritas dalam arti “bantuan” kemanusiaan semata-mata, yang didorong oleh keharusan yang samar-samar atau rasa sedih yang dangkal, seperti solidaritas yang didorong oleh adanya bencana alam. Solidaritas semacam ini memang baik, diperlukan serta merupakan suatu tanggapan terhadap tuntutan etis. Namun solidaritas ini tidak disertai dengan komitmen pribadi untuk lebih memihak dan bersatu dengan yang diberi bantuan, untuk membaktikan diri demi kesejahteraan mereka, nilainya akan menjadi sangat dangkal (Myradl, 1976; Antonich, 1991). Mengapa? Karena biasanya si pemberi bantuan, memberikan sesuatu yang mereka miliki tanpa ada rasa untuk meneruskan bantuannya lagi. Akibatnya, apabila bantuan telah habis, si penerima bantuan akan kembali pada statusnya semula, tetap miskin dan tak berdaya.

Solidaritas yang sejati harus mengalir terutama dari kesadaran Gereja sendiri bahwa kaum miskin adalah bagian dari eksistensinya (Myradl, 1976; Antonich, 1991). Ini berarti bahwa kaum miskin tidak boleh diperlakukan sebagai “objek” sosial, melainkan sebagai subjek. Jika demikian, Gereja juga tidak boleh menganggap diri sebagai lembaga utama” pemberi derma bagi kaum miskin. Sebaliknya Gereja harus menyadari bahwa dengan memberi “bantuan” pada kaum miskin, ia juga sebenarnya menerima “sesuatu” dari mereka. Jadi ada semacam hubungan timbal balik, memberi dan menerima. Persoalannya sekarang ialah apa yang diterima Gereja dari kaum miskin? Dengan memberi “bantuan” kepada kaum miskin, Gereja dapat lebih menemukan makna hidupnya yang terdalam, yaitu martabat manusiawinya dengan ikut merasakan kesusahan dan penderitaan mereka. Atau paling tidak, Gereja mulai berani mempersoalkan secara serius apa yang dimaksudkan dengan menjadi seorang manusia di tengah kehidupan yang terpecah belah, di mana ada orang hidup sementara orang lain mati, di mana kehidupan beberapa orang sebagian bergantung pada kematian orang lain dan sebaliknya (Myradl, 1976; Antonich, 1991).

### **Praktik Hidup Gereja**

Ketika solidaritas itu lahir dari kesadaran bahwa kaum miskin dan tertindas itu bagian dari eksistensi Gereja, maka Gereja pun dituntut untuk bersikap terbuka bagi mereka yang miskin (Banawiratma, 1981; Suryadi, 2016). Untuk itu, Gereja harus berani menghadirkan “sekat” pemisah antara dirinya dan kaum miskin. Demikian, sesuai dengan apa yang telah diikrarkannya (kaul kemiskinan), maka Gereja harus sungguh mempraktikkan dan menghayati kemiskinannya secara konkret.

Praktik dan penghayatan kemiskinan Gereja ini penting sebagai salah satu syarat menjalin hubungan antara Gereja dan kaum miskin. Sebab salah satu “sekat” penghalang hubungan antara Gereja dan kaum miskin adalah ketidaksesuaian antara apa yang diikrarkan oleh Gereja dan praktik penghayatannya (Banawiratma, 1981; Suryadi, 2016). Kalau demikian, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh para uskup Asia: “kalau kita hendak menempatkan diri pada pihak kebanyakan penduduk benua kita dalam corak hidup kita, kita harus ikut mengalami kemiskinan mereka. Gereja tidak dapat membentuk pulau-pulau kemewahan di lautan kemiskinan dan penderitaan. Hidup kita perorangan hendaknya memberi kesaksian akan keugaharian Injil. Tidak seorang pun, entah betapa hina atau miskin, jangan sampai merasa sukar mendekati kita dan menemukan dalam diri kita saudara-saudarinya (Riberu, 1986; Suryadi, 2016).

### ***Keterlibatan Gereja dalam Kehidupan Kaum Miskin***

Di tengah-tengah kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh struktur kehidupan masyarakat yang tidak adil, pelaksanaan solidaritas tidak cukup hanya dengan membagikan sebagian kekayaan yang dimiliki kepada mereka yang kurang beruntung tersebut. Sebaliknya, jika Gereja mau sungguh-sungguh mengamalkan prinsip solidaritas terhadap kaum miskin, maka langkah utama yang perlu ditempuh adalah menjadikan masalah dan perjuangan mereka menjadi masalah dan perjuangan Gereja juga (Kirchberger, G. & Mansford Prior, J. (1996). Ini berarti bahwa Gereja dituntut untuk terlibat secara aktif, ikut mengalami kehidupan mereka, merasakan aspirasi mereka, memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta berjalan menyertai mereka dalam usaha mencari kemanusiaan yang otentik (Kirchberger, G. & Mansford Prior, J. (1996). Dalam kaitan dengan hal ini, para uskup Asia melihat bahwa Gereja Kaum Miskin itu tampak dalam cara banyak Gereja Asia yang bergerak ke arah keterlibatan makin intensif dalam kehidupan kaum miskin, dalam usaha menyusun program pengembangan manusiawi yang menyeluruh, penuh hormat terhadap martabat manusia dan yang serasi dengan kebudayaan setempat, dalam keberpihakan Gereja dalam perjuangan kaum miskin demi keadilan, swadaya dan swasembada mereka (Kirchberger, G. & Mansford Prior, 1996; Suryadi, 2016).

Sejak Ensiklik *Quadragesimo Anno*, ensiklik-ensiklik sosial Gereja memang tidak hanya memberi petunjuk moral melainkan juga menuntut adanya suatu usaha pembaharuan kondisi transformasi struktural dan akhlak (Kirchberger, G. & Mansford Prior, J. (1996). Tuntutan ini mengalir dari suatu keyakinan bahwa hidup sosial adalah tanggung jawab bersama seluruh manusia. Di samping itu, perkembangan bangsa-bangsa yang sejati hanya mungkin dicapai dengan perubahan akhlak dan perubahan tata nasional dan internasional; bahkan, kalau tidak mungkin dengan cara lain, dengan cara yang memakai kekerasan revolusioner (Banawiratma, 1981). Dan perubahan sosial itu, mau tak mau memang menuntut adanya keterlibatan Gereja dalam dunia politik. Oleh karena itu, ajakan untuk membarui tata sosial baik nasional maupun internasional itu adalah ajakan untuk menjalankan tanggung jawab politik (Suryadi, 2016; Jebadu, 2017).

Dalam kerangka ajaran sosial Gereja ini, Gereja Kaum Miskin harus dimengerti sebagai tindakan demi kepentingan dalam perjuangan bersama dengan orang miskin yang sampai kini tidak memperoleh tempat dalam hidup bersama (Kirchberger, G. & Mansford Prior, J. (1996). Namun perlu dicatat juga bahwa perjuangan yang dimaksud di sini bukanlah perjuangan kelas untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, melainkan sebagai usaha untuk mengatasi kelas dan membangun persaudaraan supaya terlaksanalah tugas pewartaan Injil.

Dalam dokumen FABC tampak bahwa tuntutan untuk menjadi Gereja Kaum Miskin itu muncul demi evangelisasi, yaitu pewartaan Injil. Demikian juga dalam *Iustitia In Mundo* keterlibatan sosial dikaitkan secara mendalam dengan usaha pewartaan Injil: “Bagi kami,

perjuangan untuk keadilan dan partisipasi dalam transformasi dunia ternyata menjadi bagian hakiki dari pewartaan Injil. Sebab adalah tugas Gereja untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk membebaskannya dari segala bentuk penindasan (*Iustitia In Mundo*, art. 36). Menurut Evangelii Nuntiandi, Injil itu harus tertuju pada manusia dalam kenyataan hidupnya, sebab keselamatan Allah dimaksudkan bagi hidup manusia, maka kasih Injili tidak dapat diwartakan lepas dari pembebasan (*bdk. Evangelii Nuntiandi*, art. 31). Dari sini menjadi jelas bahwa keterlibatan sosial Gereja dalam kehidupan dan perjuangan kaum miskin itu merupakan wujud dan tanda dari perhatian dan kehendak Allah yang mau menyelamatkan manusia.

### **Makna Gereja Kaum Miskin**

Pilihan yang mengutamakan kaum miskin yang diwujudkan di dalam praktik solidaritas dan keterlibatan Gereja dalam perjuangan bersama kaum miskin untuk menegakkan keadilan itu penting, bukan saja bagi kaum miskin, tetapi juga bagi Gereja sendiri sebagai “sumber dan pewarta” ajaran sosial.

### **Gereja yang Sejati**

Hubungan antara Gereja dan dunia ini bisa digambarkan seperti hubungan badan dan jiwa yang saling mengandaikan. Sebagaimana jiwa tidak punya arti apa-apa tanpa badan, demikian juga Gereja terhadap dunia. Gereja akan disebut sebagai Gereja yang sejati sejauh ia mau bergulat dengan masalah dunianya (Suryadi, 2016; Dien, 2020; Sidi, 2020). Yang disebut hidup sejati tak lain adalah leburnya tubuh jasmani dengan batiniah. Ibarat bejana dan isinya. Bejana bila tak ada isinya, tidak ada artinya disebut bejana, sia-sia tidak berguna. Demikian juga, isi tanpa bejana sungguh hal yang sangat mustahil. Demi hidup yang baik, tentulah dibutuhkan bejana dan isi yang baik. Maka hal-hal duniawi atau jasmani tidak bisa dianggap remeh. Bagi pula, orang juga tidak boleh beranggapan bahwa kesempurnaan hidup tercapai apabila ia sudah dapat mengenyangkan kebutuhan jasmani. Maka agar menjadi Gereja yang sejati, ia harus menampakkan diri pada hal-hal yang duniawi (Suryadi, 2016; Dien, 2020; Sidi, 2020).

Agar Gereja dapat menampakkan diri dalam dunia, syarat utama yang harus ia miliki adalah “mau mendengar” apa saja yang ada di dunia sekitarnya. Gereja tidak boleh menutup telinga terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Mendengar di sini terutama bukan dengan telinga tetapi dengan hati, lubuk terdalam dari Gereja. Mendengar dengan hati ini sangat penting dalam hidup masyarakat seperti tampak dalam ungkapan berikut: “Anak itu hidupnya sesat, karena tidak mau mendengar nasihat orang tuanya”. Atau: “Selayaknya ia dikucilkan dari pergaulan kampungnya, karena hatinya sudah tuli terhadap suka duka sesamanya”.

Untuk dapat mendengar sekian banyak suara yang datang dari dunia, Gereja harus berani mencari keheningan. Dalam keheningan itu, Gereja akan memperoleh apa yang dikehendaki oleh suara hatinya yang berbicara atas nama Tuhan sendiri. Tanpa keheningan, Gereja tidak pernah akan mendengar, meskipun sebenarnya ia mendengar (Suryadi, 2016; Dien, 2020; Sidi, 2020). Dengan demikian, mendengar juga mengandung tuntutan untuk berbuat sesuatu.

### **Kredibilitas Gereja**

Paus Yohanes Paulus II dalam ensikliknya yang berjudul *Centesimus Annus* menegaskan bahwa praktik perjuangan Gereja bersama kaum miskin adalah masalah kredibilitas bagi pewartaan sosial Gereja dewasa ini. Di sana Paus mengatakan: “Gereja dewasa ini, lebih dari pada dahulu yakni, bahwa pewartaannya yang sosial memperoleh kredibilitas lebih, dalam kesaksian praktik dari pada dalam konsistensi ajarannya. Karena yakin akan hal ini, timbullah juga suatu *preferential option for the poor* yang tidak pernah mengesampingkan atau

mendiskriminasi kelompok lainnya. Kasih kepada orang miskin yang menentukan itu merupakan unsur dalam seluruh tradisi Gereja dan mendorong Gereja untuk menghadapi dunia, di mana kendati segala kemajuan teknis-ekonomis kemiskinan memperoleh wujud raksasa. Kasih kepada manusia dan terutama kepada orang miskin mendapat wujud konkret dalam memperjuangkan keadilan yaitu usaha untuk membuka bagi bangsa-bangsa akses pada perkembangan ekonomis dan manusiawi (Yanus, 2019; Dhana, Mikha, Jelahu & Paulina, 2021).

Kredibel artinya dapat dipercaya. Maka kalau dikatakan bahwa ajaran sosial Gereja itu bersifat kredibel artinya ajaran tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Dan kebenaran ajaran sosial Gereja itu terletak terutama bukan pada konsistensinya, yang artinya berpegang teguh pada prinsip, tetapi pada praktiknya. Dengan melakukan praktik sosial ini, Gereja diharapkan bukan hanya menjadi pewarta keadilan tetapi juga menjadi pelaksananya (Yanus, 2019; Dhana, Mikha, Jelahu & Paulina, 2021). Suatu ajaran tanpa disertai dengan teladan akan mati (bdk Yak 2:14-16).

Di samping itu, perlu disadari juga bahwa jalan utama dan ampuh yang bisa dipakai Gereja untuk menyadarkan umat akan cinta kasih Bapa yang telah rela menyerahkan Putera-Nya demi manusia adalah dengan menunjukkan, bukan saja melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata, bahwa Gereja tanpa syarat menyanggupkan diri untuk berbakti pada semua manusia, khususnya manusia yang miskin dan bahwa Gereja juga bersedia menderita dan mati seperti Tuhannya, asal kaum miskin hidup (Yanus, 2019; Dhana, Mikha, Jelahu & Paulina, 2021).

## **SIMPULAN**

Kaum miskin itu perlu diperhatikan oleh Gereja bukan saja karena mereka adalah manusia sama seperti Gereja, tetapi yang lebih penting karena mereka adalah pribadi yang merupakan citra Allah sendiri (Kej 1:27), yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan manusia lainnya. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak untuk hidup makmur. Sebagai sakramen keselamatan, kehadiran Gereja di dunia ini jelas tidak boleh bersifat eksklusif untuk dirinya. Sebagai sakramen keselamatan, Gereja dipanggil untuk mewartakan dan menghadirkan keselamatan tersebut bagi semua orang. Inilah fungsi utama kehadiran Gereja di dunia. Berdasarkan fungsinya ini, Konsili Vatikan II menuntut Gereja agar memperhatikan nasib manusia di dunia ini, khususnya nasib mereka yang miskin dan tertindas. Tuntutan Konsili ini bukannya tanpa dasar. Gereja itu berfungsi sebagai sakramen keselamatan itu hanya di dalam Kristus sebagai pewarta yang menghadirkan rencana keselamatan Allah. Kristus sadar bahwa keselamatan Kerajaan Allah itu tidak akan terasa kehadirannya bila di dunia ini masih terjadi penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum miskin dan lemah. Karena itu, dalam pewartaan dan pelayanan-Nya, Yesus secara khusus memperhatikan golongan rakyat kecil seperti ini. Konsekuensinya, jika kaum miskin dan tertindas itu menjadi perhatian utama dari pewartaan maupun pelayanan Kristus, maka Gereja sebagai sakramen keselamatan, harus juga melakukan hal yang sama.

Gereja diajak untuk mewujudkan panggilannya di tengah situasi kemiskinan seperti yang terjadi di Indonesia ini. Dalam situasi demikian, Gereja jelas tidak mungkin hanya menjadi lembaga penderma atau sinterklas. Untuk dapat mewujudkan panggilannya terhadap kaum miskin, Gereja harus berani menjadi "Gereja Kaum Miskin". Adapun yang dimaksud dengan "Gereja Kaum Miskin" di sini adalah Gereja yang tidak hanya berjuang bagi kaum miskin tetapi lebih dari pada itu, Gereja yang mau memihak dan berjuang bersama mereka. Ini berarti dalam tema "Gereja Kaum Miskin" terkandung gagasan bahwa orang miskin itu harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan sebagai objek yang perlu dikasihani. Jika kaum miskin itu

dipandang sebagai subjek, maka Gereja juga harus berani bersikap terbuka, mau menerima kaum miskin sebagai mana adanya dan menghilangkan sekat pemisah antara dirinya dan kaum miskin sehingga bisa terjadi dialog antar keduanya. Dialog antara Gereja dan kaum miskin di sini adalah dialog kehidupan. Dialog kehidupan berarti dialog yang didasarkan atas penerimaan kaum miskin sebagaimana adanya dan menjadikan masalah dan perjuangan mereka untuk mencapai kemanusiaan yang otentik menjadi masalah dan perjuangan Gereja juga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, Helena. (2018). Etika Pembangunan Ekonomi terhadap Kaum Miskin. *Jurnal Mabis*, 9(2), 85-93.
- Antonich, R. (1991). *Iman dan Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arisiwarjaya. (1987). *Membangun Gereja Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J.B. (1981). *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dien, Novry. (2020). Gereja Persekutuan Umat Allah. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 1(1), 49-64.
- Dhana, Mikha Arya Timotius Tote Jelahu & Maria, Paulina. (2021). Tanggung Jawab Sosial Gereja Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sepakat: Jurnal Pastoral Karetetik*, 7(1), 83-97.
- Dokumen Sidang Federasi Konferensi Para Uskup Asia (FABC). (1995). Terjemahan R. Hardawiryana. Bogor: Mardi Yuana.
- Dorodjatun, Koentjorojakti. (2000). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Fatimah. (2015). Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 10(2), 191-203.
- Hendrik, H. (1990). *Keadilan Sosial dalam Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius.
- Himes Kenneth R., (2013). *Christianity and the Political Order: Conflict, Cooptation and Cooperation*. Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Husna, Nurul. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 20(29), 31-45.
- Jebadu, A. (2017). Dimensi Politik Dari Misi Pembebasan Gereja Bagi Orang Miskin dan Pemeliharaan Allam Ciptaan. *Jurnal Teologi*, 6(2), 167-186.
- Kirchberger, G. & Mansford Prior, J. (1996). *Mengendus Jejak Allah: Dialog dengan Masyarakat Pinggiran*. Ende: Nusa Indah.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2008). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Terejamahan R. Hardawiryana. Jakarta: Obor.
- Loreta, N. Castro & Arij A. Roest. (1995). *Poverty and Development: the Call of the Catholic Church in Asia*. Philippines: Internasional Jaques Maritain Institute.
- Myradl, Gunnar. (1976). *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: Gramedia.
- Pareira, B.A. (1996). *Umat Katolik Indonesia Dalam Pembangunan Bangsa*. Malang: Dioma.
- Riberu, J. (1986). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Bogor: Mardi Yuana.
- Rubianto, V. (1997). *Paradigma Asia: Pertautan Kemiskinan dan Kereligiusan dalam Teologi Aloysius Pieris*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sidi, F. (2020). Sifat Eskatologis Gereja Kalimantan Timur dalam Gerakan Kerajaan Allah. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(1), 40-46. <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/63>
- Suryadi, Patris. (2016). Evangelisasi Baru Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Gereja Terhadap Kaum Miskin. *Jurnal Sepakat*, 2(1), 31-40.
- Sumual, Ivonne Sandra Hosea, Amos, dkk. (2021). Semangat Agustinus sebagai Model Pendidikan Agama Kristen dalam Mengentaskan Isu Kemiskinan di Indonesia: Suatu Usulan Teologi Konstruktif Asia. *Jurnal Epigraphe*, 5(1), 186-198.
- Yanus, A., Samdirgawijaya, W., & Silpanus, S. (2019). Perkembangan Karya Misi Gereja Katolik di Kedang Ipil (Tinjauan Panca Tugas Gereja). *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 3(2), 63-72. <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/91>
- Yunus, Muhammad. (2007). *Bank Kaum Miskin, Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Depok.